



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**LAMPUNG DAN BENGKULU**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU**

Jalan Museum No. 2, Jembatan Kecil, Singaran Pati, Kota Bengkulu, 38224;  
Telepon: (0736) 23085; Faksimile: (0736) 23112; Surel: kpknlbengkulu@kemenkeu.go.id

NOTA DINAS  
NOMOR ND-78/KNL.0501/2023

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu  
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu)  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 KPKNL Bengkulu  
Tanggal : 30 Januari 2023

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Nomor ND-15/WKN.05/2023 tanggal 04 Januari 2023 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022, terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 KPKNL Bengkulu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Teddy Suhartadi Permadi

Tembusan:  
Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi





# Laporan Kinerja KPKNL Bengkulu

Menuju Stabilitas Ekonomi  
Tetap Optimis & Waspada

# 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# Daftar Isi



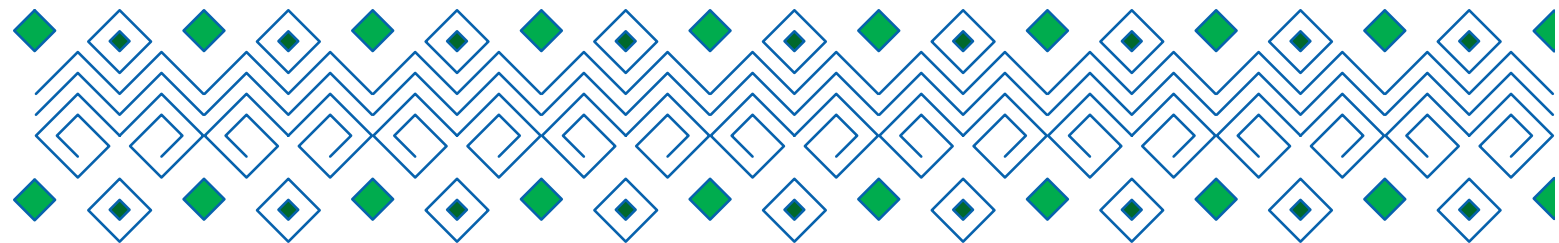
## Pendahuluan

Latar Belakang	1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
Visi dan Misi	3
Aspek Strategis Organisasi	3



## Perencanaan Kinerja

Sasaran Strategis dan Target IKU	6
----------------------------------	---



# III

## Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi	8
Realisasi Anggaran	36

# IV

Penutup	38
Lampiran	40

## BAB I | Pendahuluan

### LATAR BELAKANG

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. *Good governance* dapat terwujud melalui keseimbangan tiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Dalam rangka transparansi atas implementasi visi dan misi yang telah dicanangkan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pelaksana tugas Menteri Keuangan di bidang pengelolaan kekayaan negara menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban tertulis berupa Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN mempunyai fungsi ganda sebagai alat kendali, sekaligus alat pemacu peningkatan kinerja dari setiap seksi yang ada di lingkungan KPKNL Bengkulu. Dilihat dari fungsi kendali, kebijakan yang diinisiasi KPKNL Bengkulu nantinya berkontribusi nyata mewujudkan *good governance*. Terkait fungsi pemacu peningkatan kinerja, LAKIN diharapkan menjadi alat bantu (*tool*) internal KPKNL Bengkulu untuk *self assesment* atas kinerja organisasi selama ini.

Kami berharap visi KPKNL Bengkulu menjadi kantor pelayanan yang terpercaya dalam pengelolaan kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mampu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPKNL Bengkulu. Visi tersebut memiliki makna adanya tantangan untuk mewujudkan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas dalam pengelolaan kekayaan negara.

### TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, KPKNL Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

#### **Tugas:**

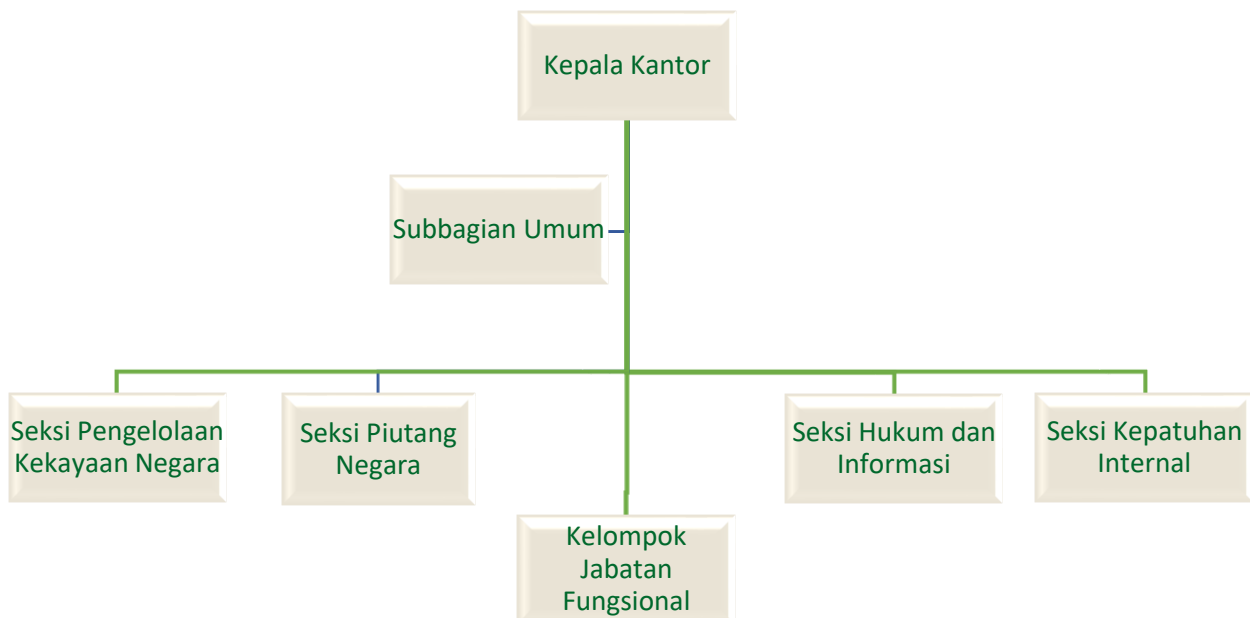
Melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang

#### **Fungsi:**

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Struktur organisasi KPKNL Bengkulu dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



## VISI DAN MISI

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, KPKNL Bengkulu mempunyai visi berikut:

“Menjadi kantor pelayanan yang terpercaya dalam pengelolaan kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, KPKNL Bengkulu mempunyai misi, antara lain:

- a) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
- b) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
- c) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
- d) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- e) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

## ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang, KPKNL Bengkulu memiliki peran strategis sebagai berikut:

- a) Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Bengkulu memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, penyusunan dan penyempurnaan peraturan, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara.

Sebagai *asset manager*, KPKNL Bengkulu mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan, serta peningkatan alternatif pembiayaan negara melalui instrumen utilisasi barang milik negara (BMN) dengan tujuan utama, yaitu pemanfaatan, penetapan status penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,

pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.

Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU). Selain BMN, Penilai KPKNL Bengkulu juga melakukan penilaian atas aset yang akan ditetapkan statusnya sebagai BMN, seperti dalam proses pengadaan aset dan dalam rangka tukar-menukar BMN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan DJKN, Penilai DJKN berwenang untuk melakukan penilaian Kekayaan Negara Dipisahkan, Barang Milik Daerah, dan Kekayaan Negara Lain-lain.

b) Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Bengkulu di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apa pun.

Selain itu, tugas KPKNL Bengkulu dalam pengurusan piutang negara adalah menyiapkan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

c) Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Bengkulu secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang, baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan

dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Bengkulu diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

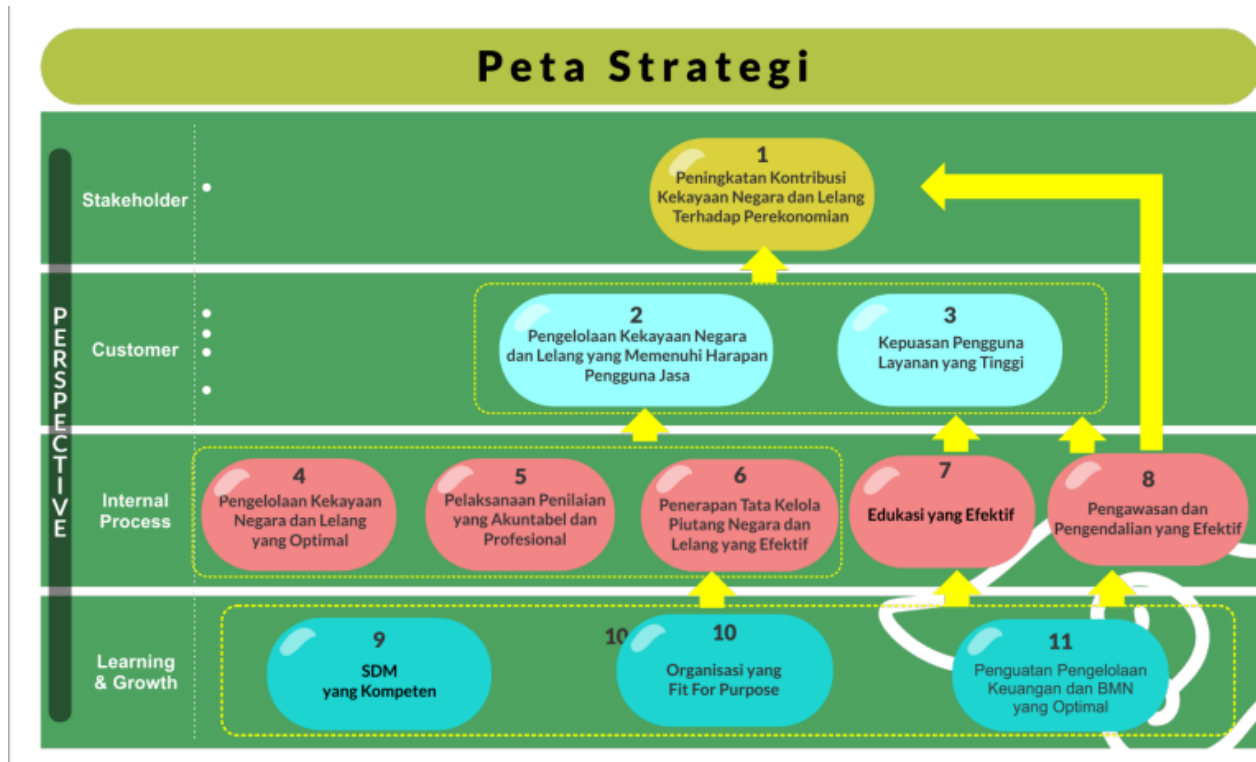
- d) Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara. Pada pengelolaan kekayaan negara, KPKNL memperoleh PNBP melalui pemanfaatan BMN. Salah satu mekanisme pemanfaatan yang sering digunakan adalah sewa sebagian atau seluruh BMN pada satuan kerja yang di kelola KPKNL Bengkulu, yang mana biaya sewa tersebut disetorkan ke kas negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil bea lelang termasuk biad balai lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## BAB II | Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Lampiran I Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Bengkulu Nomor: 7/KN.17/2022 tanggal 31 Januari 2022, KPKNL Bengkulu memiliki 11 (sebelas) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut.

### Peta Strategi KPKNL Bengkulu tahun 2022



### Target IKU KPKNL Bengkulu Tahun 2022

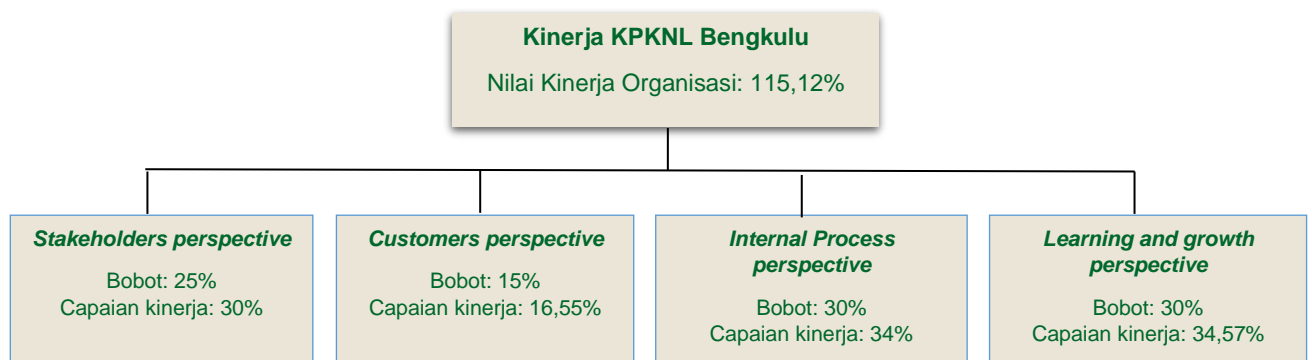
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	36
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,4

4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65
		4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100
		4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92
		6b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10
7.	Edukasi yang Efektif	7a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	89
8.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85
9.	SDM yang Kompeten	9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100
10.	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat	90
11.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5
		11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100

## BAB III | Akuntabilitas Kinerja

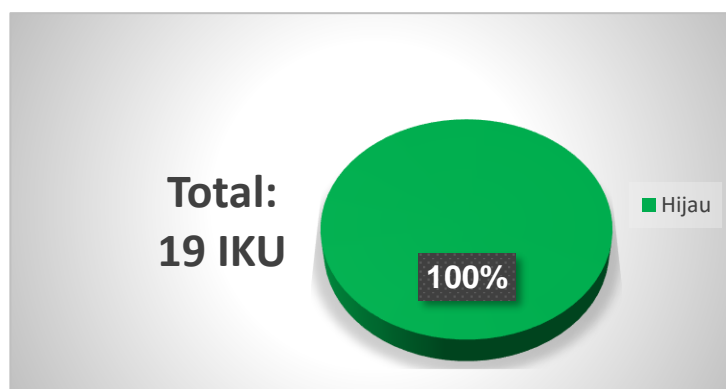
### CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bengkulu adalah sebesar 115,12%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut.

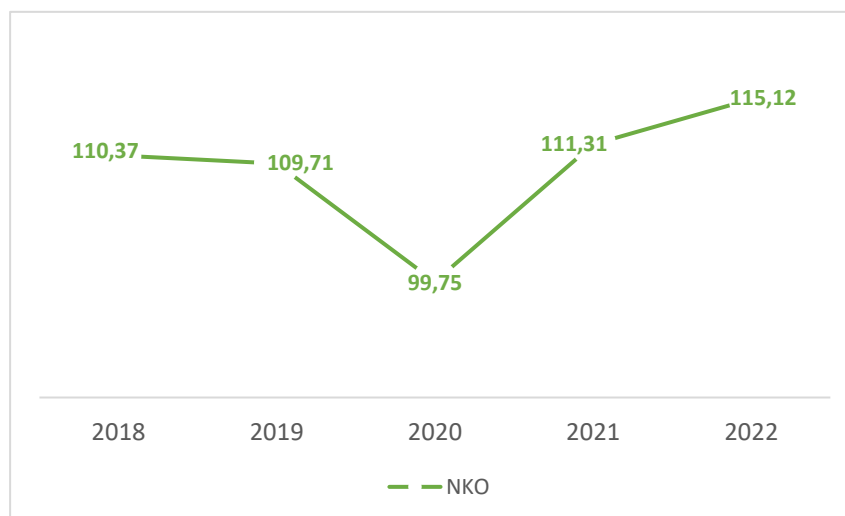


Dari 19 IKU yang dimiliki, KPKNL Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan untuk semua IKU di tahun 2022.

### Capaian Status IKU KPKNL Bengkulu Tahun 2022



Sebagai perbandingan, grafik berikut adalah capaian Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bengkulu dalam 5 tahun terakhir.



Dari grafik di atas, capaian NKO KPKNL Bengkulu pada 2022 merupakan yang tertinggi sepanjang capaian 5 tahun terakhir. Meski mengalami penurunan yang cukup signifikan pada 2020 akibat pandemi COVID-19, kinerja KPKNL Bengkulu mulai meningkat lagi pada 2021 dan semakin membaik pada 2022.

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut.

### 1. Sasaran Strategis: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian

Pemulihan ekonomi di tahun 2022 terasa mulai menggeliat. Meski belum menyamai kondisi ekonomi seperti sebelum adanya pandemi, kinerja di berbagai sektor perlahan mulai bangkit kembali dari dampak pandemi COVID-19.

KPKNL Bengkulu sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara turut mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional melalui sinergi bersama Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan perbankan di lingkungan Provinsi Bengkulu. Salah satunya pada pengelolaan BMN yang mengakomodasi penyederhanaan proses bisnis dan penyesuaian tarif pemanfaatan BMN. Program ini memberikan keringanan tarif sewa dengan diskon tarif hingga 50 persen bagi UMKM yang memanfaatkan BMN milik Kementerian/Lembaga. Dengan ini, BMN tetap optimal dimanfaatkan oleh pelaku usaha serta mampu membantu UMKM dalam meningkatkan Pemulihan Ekonomi Nasional.

*Crash program* keringanan utang yang sudah dijalankan pada tahun 2021 juga diperpanjang untuk pelunasan sampai dengan bulan Desember 2022. Melalui program ini, debitur yang mengalami kesulitan untuk melunasi utang kepada pemerintah diharapkan dapat terbantu dan memanfaatkan program ini dengan baik.

Selain itu, pelayanan lelang melalui portal lelang.go.id juga turut serta memberdayakan UMKM. *Marketplace* ini dapat dimanfaatkan para UMKM untuk menjual dan memasarkan usahanya. Hal ini membantu UMKM dalam menjangkau konsumen lebih luas dan dapat menjadi solusi alternatif bagi UMKM selain memasarkan secara langsung.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 2 IKU yang diuraikan sebagai berikut.

**a) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang KPKNL Bengkulu berasal dari:

1) PNBP Pengelolaan BMN

Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a) penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- b) pemanfaatan barang milik negara; dan
- c) pemindahtanganan barang milik negara yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

2) PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

3) PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- a) bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- b) bea lelang batal atas permintaan penjual,
- c) biaya permohonan lelang,
- d) uang jaminan pembeli wanprestasi,
- e) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Sampai dengan triwulan IV 2022, realisasi penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar Rp5.898,03 M dari target 2022 sebesar Rp3.739,24 M, sehingga indeks capaian s.d. triwulan IV sebesar 157,73%.

Dalam 5 tahun terakhir, terlihat adanya tren kenaikan capaian dari target yang ditetapkan. Berikut adalah perbandingan target dan realisasi IKU dalam 5 tahun terakhir.

T/R	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	-	100%	100%	100%
Realisasi	-	-	83,32%	140,55%	157,73%

Adapun *trajectory* tahun 2022 adalah sebagai berikut.

K-One	SS.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian							
	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2022	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	16,69%	76,93%	76,93%	109,87%	109,87%	157,73%	157,73%	
Capaian	Rp.617.917.415	Rp. 2.847.635.326	Rp. 2.847.635.326	Rp. 4.093,976,911	Rp. 4.093,976,911	Rp5.898.030.909	Rp5.898.030.909	

Kendala/ akar masalah dalam pencapaian IKU antara lain:

- 1) Dampak pandemi COVID-19 masih berpengaruh pada penurunan kemampuan masyarakat untuk menyewa BMN, membayar Piutang, dan membeli lelang
- 2) Kurangnya kesadaran satker dalam mengelola potensi BMN
- 3) Banyaknya lelang TAP (lelang hak tanggungan)
- 4) Hasil lelang UMKM belum optimal
- 5) BKPN aktif merupakan BKPN dengan pengurusan lebih dari 5 tahun sebanyak 7 berkas dari 14 berkas yang aktif sehingga keberadaan debitur sulit ditelusuri

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dengan satker terkait potensi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- 2) Melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang
- 3) Koordinasi dengan satker terkait potensi penerimaan Negara dari Biad PN
- 4) Koordinasi dengan Debitur tentang *Crash Program*
- 5) Memberikan pelayanan *online* untuk memberikan kemudahan kepada *stakeholders*

Rencana aksi selanjutnya, yaitu:

- 1) Melanjutkan kegiatan koordinasi dan sinergi yang telah dilakukan pada periode sebelumnya
- 2) Melakukan penggalan potensi Lelang
- 3) Melaksanakan monitoring capaian PNBP

## b) Persentase Produktivitas Lelang

Produktivitas lelang dinilai dari intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, lelang tersebut tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

IKU produktivitas lelang mengukur jumlah frekuensi lelang laku dibandingkan dengan seluruh frekuensi lelang selama satu tahun.

Sampai dengan triwulan IV 2022, jumlah frekuensi lelang sebanyak 815 kali. Sementara jumlah frekuensi lelang laku sebanyak 423 kali sehingga realisasi IKU tahun 2022 adalah sebesar 52,57% dari target sebesar 36%.

Dalam 5 tahun terakhir, produktivitas lelang selalu melebihi dari target yang ditetapkan awal tahun. Berikut adalah target dan realisasi IKU sejak 2018.

T/R	2018	2019	2020	2021	2022
Target	30%	32%	34%	35%	36%
Realisasi	40,66%	37,71%	39,52%	39,79%	52,57%

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

K-One	SS.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian							
	1b-CP Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2022	Pol/ K P
Target	15%	20%	20%	25%	25%	36%	100%	Max/TLK
Realisasi	46,94%	53.64%	53.64%	53,49%	53,49%	52,57%	52,57%	
Capaian	46/98	177/330	177/330	253/473	253/473	423/815	423/815	

Kendala/ akar masalah dalam pencapaian IKU antara lain:

- 1) Daya beli masyarakat yang menurun akibat krisis pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada kegiatan ekonomi secara umum
- 2) Harga limit lelang terlalu tinggi

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas, yaitu:

- 1) Melakukan publikasi dan pemasaran objek lelang melalui media sosial
- 2) Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Perbankan/Pemerintah daerah/*Stakeholders*
- 3) Melakukan penggalan Potensi lelang

Adapun rencana aksi ke depan yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Melanjutkan kegiatan koordinasi dan sinergi yang telah dilakukan pada periode sebelumnya
- 2) Memprioritaskan pelaksanaan lelang yang berpotensi laku tinggi
- 3) Melakukan publikasi & pemasaran objek lelang melalui media sosial

## **2. Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 2 IKU yang diuraikan sebagai berikut.

### **a) Persentase Realisasi Pokok Lelang**

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp20 M.

Realisasi pokok lelang dari Pejabat Lelang Kelas I (PL I) dan Pegadaian s.d. triwulan IV 2022 adalah:

- 1) Pokok lelang PL Kelas I mencapai Rp16.942,17 M dari target sebesar Rp16 M
- 2) Pokok lelang pegadaian mencapai Rp17.768,73 M dari target Rp4 M.

Pokok lelang secara keseluruhan adalah sebesar Rp34.710,90 M dari target sebesar Rp20 M. Untuk itu, kedua capaian pokok lelang dari PL I dan pegadaian turut menjadi factor pendukung keberhasilan pencapaian IKU ini.

Jika dilihat perbandingan dari tahun 2020, realisasi pokok lelang mengalami perkembangan positif terhadap target yang ditetapkan awal tahun. Berikut adalah target dan realisasi IKU dalam 5 tahun terakhir.

T/R	2018	2019	2020	2021	2022
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	117,69%	63,08%	46,24%	100,47%	173,55%

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2022 sebagai berikut.

K-One	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	28,05%	63.12%	63.12%	98%	98%	173,55%	173,55%	
Capaian	Rp.5.610.466.947	Rp12,624,455,748	Rp12,624,455,748	Rp.19.600.433.351	Rp.19.600.433.351	Rp.34.709.408.919	Rp.34.709.408.919	

Kendala/ akar masalah yang dihadapi dalam pencapaian IKU antara lain:

- 1) Daya beli masyarakat yang menurun akibat krisis Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada kegiatan ekonomi secara umum
- 2) Banyaknya Lelang TAP

Tindakan untuk mengatasi hal tersebut di atas, yaitu:

- 1) Melakukan publikasi & pemasaran objek lelang melalui media sosial
- 2) Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Perbankan/Pemerintah daerah/Stakeholders
- 3) Melakukan penggalian Potensi lelang

Adapun rencana aksi ke depannya untuk meningkatkan pencapaian IKU adalah:

- 1) Melanjutkan kegiatan koordinasi dan sinergi yang telah dilakukan pada periode sebelumnya
- 2) Memprioritaskan pelaksanaan lelang yang berpotensi laku tinggi
- 3) Melakukan publikasi & pemasaran objek lelang melalui media sosial

#### **b) Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara**

Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan *Outstanding* Piutang Negara diperoleh dari penurunan *outstanding* piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

- 1) Angsuran;
- 2) Pelunasan;

- 3) Penarikan/ Pengembalian;
- 4) Pelunasan;
- 5) PSBDT;
- 6) Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2022.

Target Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara adalah sebesar 100% (Rp1.607,09 M). Sampai dengan triwulan IV 2022, realisasi penurunan *outstanding* piutang negara sebesar 107,30% (Rp1.724,33 M).

Berikut adalah capaian IKU dalam 5 tahun terakhir.

T/R	2018	2019	2020	2021	2022
Target	100%	100%	-	100%	100%
Realisasi	143,01%	121,16%	-	131,00%	107,30%

Adapun trajectory IKU pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

K-One	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	120%	120%	120%	94.13%	94.13%	107.30%	107.30%	
Capaian	Rp.1.496.169.981	Rp.1.496.169.981	Rp.1.496.169.981	Rp.1.512.759.657	Rp.1.512.759.657	Rp. 1.724.339.657	Rp. 1.724.339.657	

Kendala/ akar masalah yang dihadapi dalam pencapaian IKU antara lain:

- 1) BKPN aktif merupakan BKPN dengan pengurusan lebih dari 5 tahun sebanyak 7 berkas dari 14 berkas yang aktif sehingga keberadaan debitur sulit ditelusuri
- 2) Beberapa kreditur sulit dihubungi terkait kerjasama dalam mencari keberadaan debitur
- 3) Pandemi COVID-19 menjadi alasan sebagian besar debitur untuk sulit membayar piutang
- 4) BKPN yang diperkirakan berpotensi mengikuti crash program tidak membayarkan sesuai surat persetujuan yang diterbitkan.

Tindakan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan penagihan kepada debitur secara langsung maupun melalui surat dan media telekomunikasi lainnya

2) Melaksanakan mekanisme keringanan utang (*crash program*)

### 3) Sasaran Strategis: Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Indeks kepuasan pengguna layanan digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

Di lingkup KPKNL Bengkulu, survei dilakukan secara internal atas layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dengan cara menyebarkan kuesioner tentang pelayanan pada bidang masing-masing kepada stakeholders atau satuan kerja (satker) yang diakumulasikan per tahun.

Berikut adalah capaian IKU dalam 5 tahun terakhir.

T/R	2018	2019	2020	2021	2022
Target	4,25	4,3	4,35	4,38	4,4
Realisasi	4,68	4,59	4,62	4,68	4,71

Indeks kepuasan pengguna layanan pada KPKNL Bengkulu Tahun 2022 meningkat dari capaian di tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2022 ini didapatkan skala 4,71 dari target awal tahun sebesar 4,40.

SS.3 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi								
3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	4,40	4,40	Max/TLK
Realisasi						107,30%	107,30%	
Capaian						4,71	4,71	

Kendala yang dihadapi biasanya adalah kendala jaringan dalam pemberian layanan *online*. Untuk itu, tindakan yang dilakukan dan akan terus dilakukan ke depannya antara lain:

- 1) Memberikan kuesioner pelayanan kepada stakeholder;
- 2) Memberikan layanan yang maksimal; dan

3) Menjalin hubungan yang baik terhadap stakeholders.

#### 4) Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila

- 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*)
- 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNBPN (*revenue generating*)
- 3) Tingginya *turn over* penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- 4) Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset, misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat
- 5) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum
- 6) Piutang negara terselesaikan dengan optimal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 4 IKU yang diuraikan sebagai berikut.

##### a) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan.

Capaian IKU tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021.

T/R	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	-	-	62%	65%
Realisasi	-	-	-	73,19%	77,28%

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

K-Wide	SS.4 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%	Max/TLK
Realisasi		66.95%	66.95%	78.67%	78.67%	77.28%	77.28%	
Capaian		66.95%	66.95%	485/615	485/615	595/615	595/615	

Dalam pencapaian IKU ini, kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Terbatasnya Anggaran/DIPA
- 2) Kendala kelancaran jaringan dalam koordinasi secara online
- 3) Pengisian formulir oleh Satker tidak tepat waktu dan tidak lengkap
- 4) Kurangnya kesadaran satker dalam mengelola potensi BMN

Tindakan yang sudah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut di atas, yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh satker di lingkungan KPKNL Bengkulu terkait pengisian form pendataan SBSK
- 2) Melakukan sosialisasi SBSK terhadap satker
- 3) Melakukan Edukasi dan komunikasi SBSK
- 4) Melakukan Survei Fisik dalam rangka Evaluasi SBSK

Adapun rencana aksi ke depan untuk meningkatkan pencapaian IKU antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh satker di lingkungan KPKNL Bengkulu terkait pengisian form pendataan SBSK
- 2) Melakukan Survei Fisik dalam rangka Evaluasi SBSK
- 3) Melakukan Permintaan data terkait Kesesuaian SBSK

#### **b) Persentase Bidang Tanah yang Disertipikatkan**

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN	Kendali K/L	Kendali Kemenkeu
1. Melaksanakan pensertipikatan BMN; 2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan	1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.	1. Menyimpan asli sertipikat; 2. <i>Updating</i> data BMN yang akan disertipikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- 1) Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
- 2) Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
- 3) Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
- 4) K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
- 5) Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan
- 6) Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2022 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Berikut adalah pencapaian IKU dalam 5 tahun terakhir.

T/R	2018	2019	2020	2021	2022
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	150%	100%	101,38%	100%	129,56%

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2022 yaitu:

K-One	SS.4 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4b-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	0	20,80%	20.80%	46,72%	46,72%	129,56%	129,56%	
Capaian	0	57 bidang	57 bidang	128 Bidang	128 Bidang	355 Bidang	355 Bidang	

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU yaitu:

- 1) Kurangnya kesadaran satuan kerja dalam melakukan pengkinian data pada sistem yang disediakan sehingga database tanah kurang akurat
- 2) Adanya kendala pada pra-survey yang diajukan dalam program sertifikasi
- 3) Terbatasnya Anggaran/DIPA

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatai kendala tersebut yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap proses penyelesaian sertifikasi aset BMN berupa tanah pada satuan kerja yang menjadi target sertifikasi melalui surat atau media sosial

- 2) Menyampaikan surat permohonan revisi anggaran kepada Kanwil BPN Provinsi Bengkulu agar anggaran yang ada segera direvisi dan SK Penlok dapat diterbitkan

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan, antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap proses penyelesaian sertifikasi aset BMN berupa tanah pada satuan kerja dan Kantor BPN yang menjadi target sertifikasi melalui surat atau media komunikasi
- 2) Menyampaikan surat himbauan kepada satker terkait permohonan melengkapi dokumen penerbitan sertifikasi BMN

### c) Persentase Efektivitas Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen, yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan

1. BKPN Lunas
2. BKPN Penarikan
3. BKPN dikembalikan, dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Pada tahun 2022, pencapaian IKU mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2021. Berikut perbandingan pencapaian IKU sejak tahun 2020.

T/R	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	-	100%	100%	100%
Realisasi	-	-	380%	100%	113%

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

K-One	SS.4 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4c-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	25%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	120%	120%	120%	100%	100%	112,50%	112,50%	
Capaian	6 berkas	6 berkas	6 berkas	8 berkas	8 berkas	9 berkas	9 berkas	

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU antara lain:

- 1) BKPN yang diperkirakan berpotensi mengikuti *crash program* tidak membayarkan sesuai surat persetujuan yang diterbitkan
- 2) Beberapa kreditur sulit dihubungi terkait kerja sama dalam mencari keberadaan debitur
- 3) Pandemi COVID-19 menjadi alasan sebagian besar debitur untuk sulit membayar piutang
- 4) BKPN aktif merupakan BKPN dengan pengurusan lebih dari 5 tahun sebanyak 7 berkas dari 14 berkas yang aktif sehingga keberadaan debitur sulit ditelusuri

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala di atas, yaitu:

- 1) Melaksanakan mekanisme keringanan utang (*crash program*)
- 2) Melakukan publikasi dan sosialisasi *Crash Program*

Rencana ke depannya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan penagihan kepada debitur secara langsung maupun melalui surat dan media telekomunikasi lainnya
- 2) Melakukan koordinasi dan sinergi dengan kreditur

**d) Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp6.000 Triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Berikut perbandingan capaian IKU dalam 3 tahun terakhir.

T/R	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	-	100%	100%	100%
Realisasi	-	-	121%	101,49%	110,48%

Adapun trajectory IKU pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

SS.4 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal								
4d-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	10%	48.10%	48.10%	86,00%	86,00%	110,48%	110,48%	
Capaian	5/355	171/355	171/355	330/355	330/355	373/355	373/355	

Dalam pencapaian IKU ini, hal yang menjadi permasalahan, antara lain:

- 1) Terbatasnya Anggaran/DIPA
- 2) Kendala kelancaran jaringan dalam koordinasi secara online
- 3) Kurangnya kesadaran satker dalam mengelola potensi BMN

Hal yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di atas, antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh satker di lingkungan KPKNL Bengkulu terkait pengisian form evaluasi BMN
- 2) Melakukan pemetaan terhadap BMN yang akan dievaluasi kinerjanya
- 3) Melakukan survei fisik dalam rangka Evaluasi BMN

Adapun rencana aksi ke depan yang bisa dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan pemetaan terhadap BMN yang akan dievaluasi kinerjanya;
- 2) Melakukan koordinasi dengan satker terkait pengisian form dan penyelesaian evaluasi kinerja BMN
- 3) Melakukan Survei Fisik dalam rangka Evaluasi BMN.

## 5) Sasaran Strategis: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian

### a) Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian, nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi IKU dalam 3 tahun terakhir.

T/R	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	-	30%	22%	19%
Realisasi	-	-	1,71%	0,79%	0%

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

K-One	SS.5 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	5a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	Min/TLK
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Tindakan yang telah dilaksanakan dan rencana aksi yang akan dilakukan ke depan agar pencapaian IKU tetap terjaga antara lain:

- 1) Berkoordinasi dengan seksi PKN untuk menjaga deviasi ketergunaan hasil penilaian sehingga laporan penilaian dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan dalam membuat keputusan
- 2) Melakukan peer-reviu Laporan Penilaian

**b) Sasaran Strategis: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif**

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut di antaranya meliputi perencanaan,

penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 2 IKU yang diuraikan sebagai berikut.

**a) Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction***

*E-auction* adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. *E-auction* ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui *email*) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih *real time* dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi *e-auction* meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*).

Dalam 3 tahun terakhir, pelaksanaan lelang seluruhnya sudah melalui *e-auction*. Berikut adalah perbandingan target dan realisasi IKU sejak tahun 2020.

T/R	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	-	90%	92%	92%
Realisasi	-	-	100%	100%	100%

Adapun hal yang telah dilakukan dan terus akan dilakukan ke depannya antara lain:

- 1) Menetapkan pelaksanaan lelang seluruhnya melalui *e-auction*
- 2) Melanjutkan kegiatan monitoring dan pemantauan lelang yang telah dilakukan pada periode sebelumnya

**b) Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN**

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi *Dropbox*/Aplikasi lain Khusus Lelang\* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 15%

Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%.

Berikut adalah target dan realisasi 2 tahun terakhir.

T/R	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	-	-	12,5%	10%
Realisasi	-	-	-	0%	0%

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2022 sebagai berikut.

SS.6 Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
6b-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Min/TLK
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Hal yang menjadi kendala dalam pencapaian IKU ini adalah:

- 1) Keterlambatan pemuktahiran data pada aplikasi OMSPAN dan adanya kendala kelancaran jaringan internet di luar kendali pegawai/PIC
- 2) Perubahan status pemenang lelang menjadi wanprestasi mempengaruhi data pada aplikasi *dropbox*
- 3) Penarikan data yang dilakukan berbeda dengan waktu penutupan pembukuan pada aplikasi Pegadaian.

Tindakan yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan untuk pencapaian IKU ini yaitu:

- 1) Melakukan input data pada aplikasi dropbox pada sesuai dengan waktu yang ditetapkan
- 2) Melakukan input data pada aplikasi dropbox dengan ketelitian dan kecermatan tinggi.

## 7) Sasaran Strategis: Edukasi yang Efektif

Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan *feedback* yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

### a) Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas

- 1) tingkat pemahaman
- 2) kualitas materi
- 3) kualitas fasilitator
- 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan.

Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau *workshop*. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh KPKNL kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
- 2) kualitas materi (bobot 15%),
- 3) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
- 4) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

IKU ini merupakan rata-rata rekapitulasi nilai kuesioner edukasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang.

Dalam 5 tahun terakhir, realisasi IKU ini selalu mendapat skala yang cukup tinggi dengan tingkat efektivitas sangat efektif. Berikut perbandingan target dan realisasinya.

T/R	2018	2019	2020	2021	2022
Target	87	87	88	89	89
Realisasi	95,23	95,48	92,35	90,26	95,39

Adapun *trajectory* IKU pada 2022 adalah sebagai berikut.

SS.7 Edukasi yang efektif								
7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	-	89	89	-	-	89	89	Max/Avrg
Realisasi		105%	105%			109,35%	107,17%	
Capaian		93,45	93,45			97,32	95,39	

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU adalah:

- 1) Kendala kelancaran jaringan dalam pemberian edukasi dan komunikasi
- 2) Beberapa materi sosialisasi lebih efektif jika dilakukan tatap muka

Tindakan yang dilaksanakan dalam pencapaian IKU yaitu:

- 1) Melaksanakan kegiatan edukasi dan komunikasi
- 2) Memberikan kuisisioner efektivitas edukasi dan komunikasi kepada satker
- 3) Merekap hasil kuisisioner efektivitas edukasi dan komunikasi.

Adapun rencana aksi ke depan antara lain:

- 1) Menjadwalkan kegiatan edukasi dan komunikasi
- 2) Memberikan kuisisioner efektivitas edukasi dan komunikasi kepada satker

#### 8) Sasaran Strategis: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- 1) terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- 2) Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti
- 3) Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN
- 4) Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti

##### a) Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:		
Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
	Hibah	1. Berita acara serah terima

Dalam 4 tahun terakhir, realisasi IKU semakin meningkat dari target yang ditetapkan awal tahun. Berikut adalah perbandingan target dan realisasinya.

T/R	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	70%	80%	85%	85%
Realisasi	-	80%	80,95%	90,36%	92,65%

Adapun *trajectory* pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

K-One	SS.8 Pengawasan dan pengendalian yang efektif							
	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	-	40%	40%	-	-	85	85	Max/TLK
Realisasi		77.59%	77.59%			92,65%	92,65%	
Capaian		77.59%	77.59%			92,65%	92,65%	

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU adalah kurang patuhnya satker dalam menindaklanjuti persetujuan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN. Untuk itu, tindakan yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan ke depannya antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dengan stakeholder melalui media whatsapp/telepon
- 2) Meminta Bukti Penerimaan Negara atas hasil dari pemindahtanganan BMN
- 3) Melakukan pembinaan dan monitoring kepada stakeholder.

## 9) Sasaran Strategis: SDM yang Kompeten

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

### a) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar Jam Pelatihan (jamlat) adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun, yaitu 24 jam pelatihan (JP). Satu jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan *training* dengan kesepakatan pegawai dan atasannya.

Dalam 3 tahun terakhir, KPKNL Bengkulu berhasil mendapatkan capaian maksimal dalam IKU ini. Berikut perbandingan target dan realisasi IKU dalam 5 tahun terakhir.

T/R	2018	2019	2020	2021	2022
Target	90%	87%	100%	100%	100%
Realisasi	96%	100%	120%	120%	120%

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

SS.9 SDM yang kompeten								
9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	9,60%	62.40%	62.40%	115,2%	115,2%	120%	120%	
Capaian	2/25	13/25	13/25	24/25	24/25	25/25	25/25	

Kendala yang dijumpai dalam pencapaian IKU di antaranya:

- 1) Kendala kelancaran jaringan dalam mengakses PJJ/ *e-learning*
- 2) Kurangnya kesadaran pegawai dalam mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan.

Tindakan yang telah dilakukan dan rencana aksi ke depannya, yaitu:

- 1) Monitoring pelaksanaan sosialisasi yang diikuti pegawai dalam rangka memenuhi 24 JP
- 2) Mengusulkan diklat melalui Aplikasi Diklat DJKN
- 3) Melakukan Rekapitulasi melalui aplikasi DAPIT.

## 10) Sasaran Strategis: Organisasi yang *Fit for Purpose*

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi. Untuk pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi dalam 2 IKU yang akan dirinci di bawah ini.

### a) Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi, dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi IKU dalam 5 tahun terakhir.

T/R	2018	2019	2020	2021	2022
Target	70	75	70	75	80
Realisasi	90,05	97,7	95,5	81,36	96,23

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

SS.10 Organisasi yang fit for purpose								
10a-N Nilai hasil revidu pengelolaan kinerja								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	80	80	Max/TLK
Realisasi						120,29%	120,29%	
Capaian						96,23	96,23	

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- 1) Kendala kelancaran jaringan dalam melakukan koordinasi online
- 2) Kurangnya pemahaman pegawai atas dokumen pengelola kinerja.

Tindakan yang telah dilakukan, yaitu:

- 1) Membuat *checklist* dokumen revidu pengelolaan kinerja
- 2) Melakukan pengadministrasian dokumen pengelolaan kinerja.

Rencana aksi untuk peningkatan capaian kinerja ini adalah dengan melakukan pengadministrasian dokumen-dokumen Revidu Pengelolaan sesuai permintaan Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu.

#### b) Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinasi oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan *Forum Group Discussion*. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.

Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, realisasi IKU ini pada 2022 mengalami peningkatan. Berikut adalah perbandingannya.

T/R	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	-	-	80	90
Realisasi	-	-	-	98,9	99,81

Adapun trajectory IKU pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

SS.10 Organisasi yang fit for purpose								
10b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	90	90	90	90	90	90	90	Max/TLK
Realisasi	110,69%	110,83%	110,98%	110,88%	110,83%	111,11%	110,90%	
Capaian	99,62	99,75	99,69	99,88	99,75	100	99,81	

Tindakan yang telah dilakukan dan rencana aksi ke depannya, yaitu:

- 1) melakukan FGD tiap triwulan
- 2) mendokumentasikan kegiatan FGD tiap triwulan.

#### 11) Sasaran Strategis: Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi 2 IKU sebagai berikut.

##### a) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan

anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Dalam 5 tahun terakhir, realisasi IKU ini mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Berikut adalah perbandingan target dan realisasi IKU.

T/R	2018	2019	2020	2021	2022
Target	95%	95%	95%	95,5%	95,5%
Realisasi	102,45%	90,61%	95,96%	95,6%	95,98%

Adapun trajectory IKU pada 2022 adalah sebagai berikut.

K-One	SS.11 Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/TLK
Realisasi	104,71%	100,67%	100,67%	102,69%	102,69%	100,34%	100,34%	
Capaian	100%	96.13%	96.13%	98,07%	98,07%	95,82%	95,82%	

Akar masalah dalam pencapaian IKU ini antara lain.

- 1) Penyerapan DIPA yang masih cukup rendah
- 2) Penyerapan anggaran sangat bergantung pada aktivitas seluruh seksi dan subbag
- 3) Capaian output yang diinput di Sakti sangat bergantung pada capaian kinerja seluruh Seksi dan subbagian umum.

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu.

- 1) Melakukan monitoring bulanan penyerapan anggaran pada KPKNL Bengkulu
- 2) Melakukan revisi Halaman III DIPA

Adapun rencana aksi ke depannya adalah dengan melakukan pengelolaan UP secara tepat waktu.

#### b) Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen, yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

## **1. Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN**

Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN diukur dari:

### **A. Dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA),**

Terdiri dari komponen Temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP, ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN, Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN, dan persentase BMN yang memiliki dokumen kepemilikan.

### **B. Persentase Validitas dan Completeness Master Aset**

Komponen ini menghitung 2 (dua) kriteria utama, yaitu validitas data sertifikat tanah dan kelengkapan data master aset rumah negara. Validitas data sertifikat tanah bertujuan untuk memastikan bahwa data sertifikat tanah a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan telah diupload dan diisi dengan lengkap, tepat, dan valid. Sedangkan kelengkapan data master aset rumah negara, yaitu melengkapi profil BMN berupa Rumah Negara antara lain

1. detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan);
2. foto;
3. dokumen seperti SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada);
4. batas dan GPS;
5. fasilitas; dan
6. konstruksi.

## **2. Dukungan Tingkat Kualitas Pengadaan**

Dukungan Tingkat Kualitas Pengadaan berfokus pada dukungan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan. Indeks tata kelola pengadaan (ITKP) merupakan Indeks yang diukur oleh LKPP yang terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan. Dalam mendukung capaian ITKP dengan target minimal baik di tahun 2023 maka diperlukan indikator dukungan ITKP yakni Persentase Dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan. Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2022 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :

### **a. SiRUP**

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2023 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2023 yang menjadi target.

b. *e-Tendering*

Pemanfaatan *e-Tendering* diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan *e-Tendering*. Indikator ini diukur dari nilai pagu *E-Tendering* (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu *E-Tendering* (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

c. *e-Purchasing*

Pemanfaatan *e-Purchasing* diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan *e-Purchasing*. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket *e-Purchasing* Selesai dibagi Jumlah Paket *e-Purchasing* Aktif x 100%. Paket *e-Purchasing* dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket *E-Purchasing* yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non *e-Tendering* dan Non *e-Purchasing*

Pemanfaatan Non *e-tendering* dan non *e-Purchasing* diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non *e-tendering* dan non *e-purchasing*. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non *E-Tendering* dan Non *E-Purchasing* (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non *E-Tendering* & Non *E-Purchasing* (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2023 dapat tercapai.

Dibandingkan dengan tahun 2019, IKU ini mengalami peningkatan realisasi dari target yang ditetapkan. Berikut perbandingannya.

T/R	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	100%	-	-	100%
Realisasi	-	120%	-	-	182%

Adapun *trajectory* pada 2022 adalah sebagai berikut.

SS.11 Pengelolaan Keuangan yang Optimal								
11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target						100%	100%	Max/TLK
Realisasi						182%	182%	
Capaian						182%	182%	

Tindakan yang telah dilakukan dan rencana ke depannya adalah dengan melakukan monitoring pengelolaan BMN dan pengadaan.

## REALISASI ANGGARAN

Untuk realisasi penyerapan anggaran dan pengukuran capaian output belanja dan penyerapan anggaran (non belanja pegawai) KPKNL Bengkulu tahun anggaran 2022, dapat dilihat melalui tabel berikut.

### Pengukuran Capaian Penyerapan Anggaran KPKNL Bengkulu Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-	0%
2	Belanja Barang	1.837.014.000	1.619.810.221	217.203.779	88,18%
3	Belanja Modal	-	-	-	0%
<b>TOTAL</b>		<b>1.837.014.000</b>	<b>1.619.810.221</b>	<b>217.203.779</b>	<b>88,18%</b>

### Pengukuran Capaian Output Non Belanja Pegawai TA 2022

No	Rincian Output	Pagu	Realisasi Anggaran	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	CRO
1	4796.BMB.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	2.315.000	2.315.000	30	74	2,47

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU**

2	4796.BMB.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	5.491.000	1.110.000	85	85	1,00
3	4798.AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	44.240.000	38.050.000	120	171	1,43
4	4798.AAH.002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	25.096.000	4.970.000	5	9	1,80
5	4798.AAH.003 Risalah Lelang	4.512.000	1.665.000	250	436	1,74
6	4798.AAH.005 Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	11.024.000	6.380.000	10	19	1,90
7	4798.FAE.001 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	7.508.000	6.908.000	274	353	1,29
8	4798.FAE.003 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	14.263.000	13.410.000	50	59	1,18
9	4798.FAE.004 Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	44.504.000	43.430.000	615	615	1,00
10	4798.FAE.006 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	2.256.000	970.000	1	2	2,00
11	4798.FAE.007 Rekomendasi Hasil Penilaian	7.200.000	4.950.000	1	2	2,00
12	4798.FAE.009 Penggalian Potensi Lelang	6.328.000	3.885.000	1	2	2,00
13	4700.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	6.140.000	5.853.000	2	15	7,50
14	4701.EBA.002 Kerumahtanggaan	54.724.000	16.969.064	12	12	1,00
15	4701.EBA.994 Layanan Perkantoran	1.596.021.000	1.467.390.157	12	12	1,00
16	4702.BMB.002 Kehumasan	2.696.000	220.000	6	19	3,17
17	4704.EBA.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	2.696.000	1.335.000	5	7	1,40
<b>TOTAL</b>		<b>1.837.014.000</b>	<b>1.619.810.221</b>			
<b>Efisiensi</b>						<b>13,85%</b>

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa KPKNL Bengkulu berhasil mewujudkan pelaksanaan anggaran yang optimal dan sangat baik dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 13,85% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 88,18%.

## BAB IV | Penutup

Laporan Kinerja KPKNL Bengkulu ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

KPKNL Bengkulu telah menerapkan manajemen kinerja, yakni dengan membuat cascading target kinerja dengan menurunkan sasaran strategis Kemenkeu *Four*, memperjelas sasaran strategis dengan IKU, serta penandatanganan kontrak kinerja sampai tahap pelaksana.

Dalam perjalanannya, KPKNL Bengkulu juga melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk pelaporan berkala capaian kinerja, dan pelaksanaan rapat evaluasi. Dengan ini, diharapkan nilai kinerja organisasi KPKNL Bengkulu mampu terus meningkat setiap tahunnya.

Sebagai salah satu kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Bengkulu mampu menjalankan tugasnya dengan kinerja organisasi tahun 2022 sebesar 115,12%.

Adapun langkah-langkah atau strategi yang akan dilakukan KPKNL Bengkulu dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
  - a) Peningkatan layanan agar realisasi PNBP tahun 2023 semakin meningkat dan memperkuat misi DJKN sebagai *Revenue Center*.
  - b) Memperkuat sinergi dengan Satuan Kerja agar program-program pengelolaan kekayaan negara berjalan dengan baik.
2. Bidang Pengurusan Piutang Negara
  - a) Upaya penagihan akan terus diintensifkan baik melalui telepon, surat maupun kunjungan langsung ke lapangan.
  - b) Penggalan potensi pengurusan Piutang Negara ke Pemerintah Daerah dan koordinasi dengan Penyerah Piutang.
3. Bidang Lelang
  - a) Memanfaatkan Pekan Lelang dalam mengenalkan lelang kepada masyarakat dan *stakeholders*.
  - b) Penggalan potensi lelang kepada *stakeholders* yang masih jarang memanfaatkan layanan lelang.
4. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
  - a) Melakukan penajaman atas rencana kegiatan dan pembiayaan yang tercantum dalam DIPA TA 2023 tanpa menghilangkan efektivitas pencapaian *outcome*
  - b) Meningkatkan evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran dan pencapaian output

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak mengenai tugas dan fungsi KPKNL Bengkulu sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, Laporan Kinerja dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi ke depannya. Sementara secara eksternal, Laporan Kinerja dapat menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga KPKNL Bengkulu dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

## LAMPIRAN

1. Kontrak Kinerja KPKNL Bengkulu Nomor: 7/KN.17/2022 tanggal 31 Januari 2022
2. Rincian Target Capaian Kinerja Kepala KPKNL Bengkulu



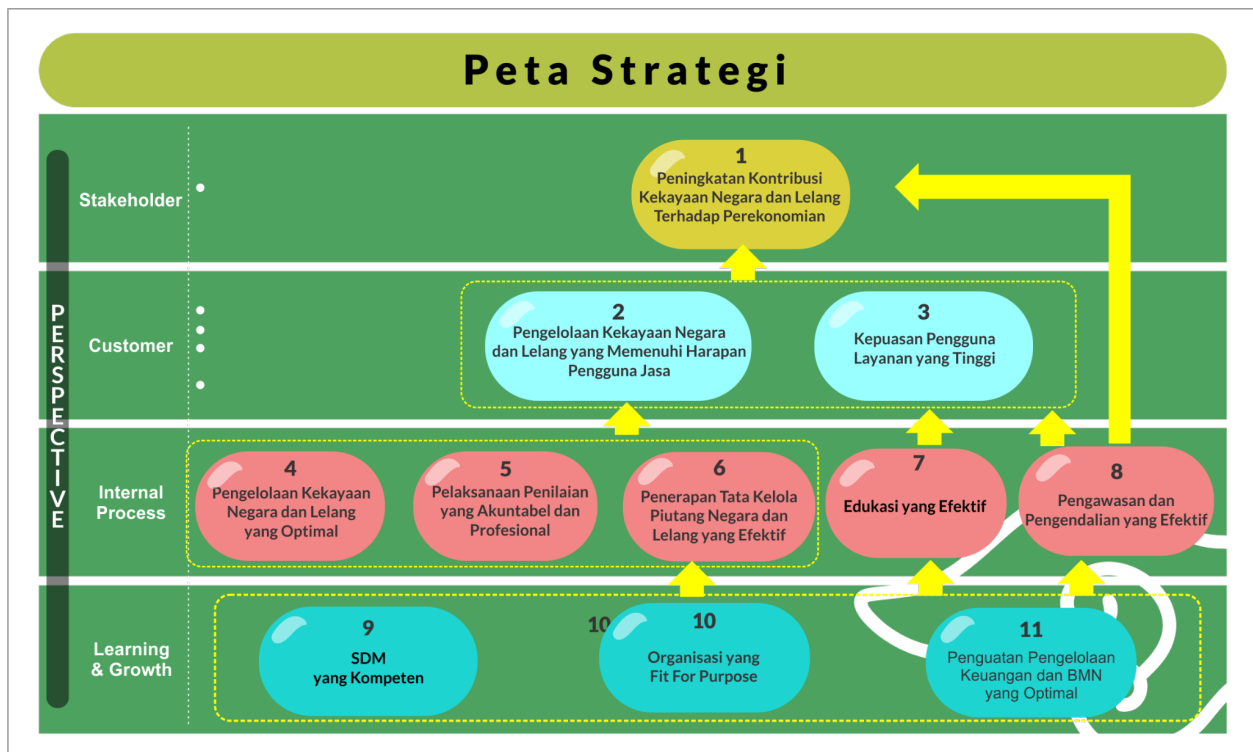
**KONTRAK KINERJA  
NOMOR: 7/KN.17/2022  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG BENGKULU  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100
		1b-CP Persentase produktivitas lelang	36
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,40
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65
		4b-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100
		4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92
		6b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10
7	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85
9	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100
10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai reuiu pengelolaan kinerja	80
		10b-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan	11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	BMN yang optimal	11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100

Kegiatan	Anggaran
<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	Rp145.035.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp7.806.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp0
3. Pengelolaan Aset	Rp137.229.000
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp0
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp0
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp0
<b>Dukungan Manajemen</b>	Rp1.662.277.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp6.140.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.650.745.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp2.696.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp0
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp2.696.000
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp0

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan  
Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik  
Arik Hariyono

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik  
Teddy Suhartadi Permadi



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10	30	30	60	60	100	100
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	15	20	20	25	25	36	36
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20	40	40	70	70	100	100
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	25	50	50	75	75	100	100
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL						4,40	4,40
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK		50	50	55	55	65	65
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	25	50	50	75	75	100	100
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	40	40	75	75	100	100
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19	19	19	19	19	19	19
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92	92	92	92	92	92	92
6b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Edukasi yang Efektif							
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi		89	89		89	89	89
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara		40	40		40	85	85
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15	40	40	75	75	100	100
10	Organisasi yang Fit For Purpose							
10a-N	Nilai rewiu pengelolaan kinerja						80	80
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat	90	90	90	90	90	90	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
11b-N	Persentase Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10	50	50	85	85	100	100

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Teddy Suhartadi Permadi



